

Struktur Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

by Handoko Arwi Hasthoro

Submission date: 19-Mar-2023 09:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 2040289084

File name: Handoko_-_Struktur_Organisasi_-_EBBANK_2014.pdf (248.71K)

Word count: 3753

Character count: 18072

EBBANK

Volume 5 No 1, Juni 2014

Hal. 697 – 717

**Struktur Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah²**

Handoko A Hasthor³

Henry Sarnowo

Universitas Janabadra Yogyakarta

e-mail: hasthor@gmail.com

Abstract

This study tried to demonstrate empirically the factors that affect the quality of financial reports of local governments in Indonesia. Organizational structure and culture of the organization and will be used as a determinant and explanatory item for the quality of financial statements. The size of the organization, the number of regional working units, and the number of board members representing the local people used as a proxy for organizational structure. Organizational culture proxied by the quality of e-government implementation. The quality of local government financial reports using Government Audit Agency audit opinion as a proxy. Using multiple linear regression method, the results of the study with a sample of 184 Local Governments show that the organizational culture (e-government) has a positive effect on the quality of local government financial reports. Organizational structure's variable which is organizational size and the number of members of regional parliaments has no effect on the quality of local government financial reports. Variable number of regional working units has a negative effect on the quality of local government financial reports. Statistical results shows that the average (mean) quality of local government financial reports have not been good since the value is 2.804 which means that below the qualified opinion (value 3). Implication of this study is the local government must pay attention to the quality of financial reporting by implementing properly the standards required by way of education and can often be done through cooperation with universities.

Keywords: *Organizational structure, organizational culture, quality of financial statements, local government, accrual accounting*

1. Pendahuluan

² Paper ini pernah dipresentasikan di Konferensi Akuntansi Bisnis & Ekonomi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten tanggal 27 Nopember 2013. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas komentar-komentar yang disampaikan.

³ Corresponding author

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pemerintah untuk menggunakan basis akrual penuh dalam menyusun laporan keuangan. PP ini menggantikan PP No 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual. Namun, pelaksanaan PP No 71 Tahun 2010 ini baru diberlakukan mulai tahun fiskal 2014 dengan alasan agar cukup waktu untuk sosialisasi dan edukasi bagi entitas pelaporan seperti pemerintah pusat, kementerian, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D), pemerintah daerah (kabupaten/kota), lembaga negara, dan entitas pemerintahan lainnya. Diharapkan standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi pemerintahan.

Entitas pelaporan, seperti pemerintah daerah (PEMDA), banyak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berdasar PP No 24 Tahun 2005. Mereka dihadapkan dengan banyaknya aturan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar satu dengan lainnya. Ada peraturan menteri dalam negeri, undang-undang keuangan negara, undang-undang otonomi daerah, undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah, dan sebagainya. Masalah lain yang terjadi adalah sumberdaya manusia yang kurang memadai dalam penyusunan laporan keuangan baik bidang ilmu maupun kemampuan teknis. Terminologi dan interpretasi dalam PP susah dipahami oleh pegawai PEMDA, apalagi bagi mereka yang tidak berlatarbelakang pendidikan ekonomi atau akuntansi.

PP No 24 Tahun 2005 kemudian diganti dengan PP No 71 Tahun 2010. Basis akuntansi yang disyaratkan juga berganti dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Basis akrual akan memberikan gambaran informasi yang lebih lengkap,

akurat, transparan dan lebih bermanfaat, seperti informasi biaya pelayanan yang diberikan pemerintah, bagi pengambilan keputusan pemerintah maupun para *stakeholders* lain. Akuntansi akrual telah menjadi bagian penting pada era penerapan *New Public Management* (NPM). Pengadopsian akuntansi akrual oleh sektor publik (pemerintahan) bisa dikatakan merupakan bagian dari reformasi NPM. Tiga hal penting dalam reformasi NPM adalah desentralisasi, meningkatkan daya saing dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas, dan akuntabilitas bagi peningkatan kinerja (Timoshenko dan Adhikari 2009).

Tujuan pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 71 Tahun 2010 tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi pemerintahan. Banyaknya kendala yang dihadapi merupakan tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah. Tetapi upaya menuju perbaikan harus terus dilakukan agar bisa memenuhi tuntutan para *stakeholders* untuk mewujudkan *good governance* di organisasi pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas akan memberi kepercayaan bagi para pengguna agar tepat dalam mengambil keputusan. Kepercayaan yang tumbuh dapat meningkatkan arus investasi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan PEMDA di Indonesia. Penelitian ini akan mencoba membuktikan secara empiris apakah struktur organisasi dan budaya organisasi pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan PEMDA (kota dan kabupaten) di seluruh Indonesia. Struktur organisasi yang digunakan dalam penelitian ini diproksi dengan ukuran PEMDA (*size*), jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Budaya organisasi dalam penelitian ini

menggunakan proksi kualitas *e-government* untuk memberi gambaran mengenai respon PEMDA terhadap masyarakat dan budaya transparansi. Penelitian ini menambahkan variabel kontrol berupa pendidikan kepala daerah dan status daerah agar memperkuat determinasi pengaruh variabel independen. Untuk kualitas laporan keuangan menggunakan proksi opini audit atas laporan keuangan PEMDA oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian bidang akuntansi sektor publik (pemerintahan) di Indonesia banyak mengkaji tentang kinerja keuangan daerah, seperti pengaruh *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan (Hariyadi 2002), *agency theory* di sektor publik (Abdullah dan Asmara 2007), perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah (Azhar 2008), pengaruh karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan (Sumarjo 2010). Sedangkan variasi di luar Indonesia diantaranya adalah penggunaan *balanced scorecard* untuk mengukur kinerja di organisasi sektor publik (Chan 2004; Wilson, Hagarty dan Gauthier 2004), pengaruh manajemen kinerja terhadap kinerja (Verbeeten 2008; Yang dan Modell 2013), dan pengaruh perubahan manajemen politik terhadap kinerja pemerintah daerah di Inggris (Fenwick dan Miller 2012).

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan PEMDA di Indonesia tidak banyak dilakukan, sehingga ini penting dilakukan. Keputusan pemerintah untuk mengadopsi akuntansi akrual dengan mengeluarkan PP No 24 Tahun 2005 (*cash toward accrual*) dan diperbaharui dengan mengeluarkan PP No 71 Tahun 2010 (*full accrual*) membutuhkan kesiapan dan pengetahuan yang memadai bagi pelaksana akuntansi di PEMDA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 1) tidak menggunakan variabel kinerja keuangan, 2)

menggunakan variabel aspek teknologi dalam pemerintahan untuk proksi budaya organisasi, dan 3) menggunakan variabel opini audit sebagai proksi kualitas laporan keuangan PEMDA yang belum pernah dikaji di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka Dan Perumusan Hipotesis

a. Tinjauan Pustaka

Penggunaan akuntansi akrual dipercaya akan menciptakan transparansi yang lebih tinggi atas aktivitas pada organisasi sektor publik yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam lingkungan pemerintahan. Beberapa studi membuktikan bahwa defisiensi dalam sistem akuntansi merupakan kelemahan penting dalam manajemen sektor publik terutama di negara-negara berkembang (Blondal 2003; Marwata dan Alam 2006; Wyk 2007; Adhikari dan Mellemvik 2011). Dalam hal kinerja, relatif sedikit yang bisa diketahui tentang pengukuran kinerja sektor publik dalam konteks negara sedang berkembang (Mimba, Helden dan Tillema 2007).

Perubahan sistem politik dan sosial kemasyarakatan akibat arus deras reformasi telah menuntut pengelolaan pemerintahan untuk lebih baik (*good government governance*). Tuntutan akan transparansi publik, kinerja yang baik, akuntabilitas yang tinggi telah membawa para manajer pemerintahan daerah untuk mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk merespon tuntutan tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, menggantikan PP No 24 Tahun 2005, yang mewajibkan bahwa semua level pemerintahan di wilayah hukum Republik

Indonesia untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Posisi Keuangan / Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal penting bagi pengguna dalam mengambil keputusan mengenai entitas pelaporan (pemerintah daerah). Para pengguna butuh rasa aman dan keyakinan yang memadai dalam pengambilan keputusan. Melalui laporan keuangan yang transparan dan jujur diharapkan kecurangan-kecurangan, seperti korupsi yang merugikan rakyat, bisa dicegah dan dihilangkan (Bastian 2010). Hal ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas seperti harapan pengguna. Salah satu ciri laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah laporan keuangan disusun berdasar standar akuntansi pemerintahan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Untuk memastikan kualitas laporan keuangan daerah, yang disusun berdasar standar akuntansi pemerintahan, dibutuhkan peran lembaga yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 6 menyebutkan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan laporan keuangan daerah dan opini audit yang diberi oleh BPK bisa menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disusun berdasar standar akuntansi pemerintahan.

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, seperti ukuran organisasi. Ukuran organisasi adalah seberapa besar organisasi tersebut (Patrick 2007). Semakin besar ukuran organisasi, maka tuntutan untuk pertanggungjawaban dan kinerja juga semakin besar. Tantangan dalam optimalisasi ukuran pemerintah daerah adalah: 1) *kapasitas*, ukuran pemerintah berperan dalam kecukupan keuangan atau kapasitas manajerial, dan 2) *fragmentasi* dapat melemahkan efisiensi sehingga menghalangi perlunya koordinasi untuk persaingan dalam ekonomi regional (Warner 2012). Ukuran organisasi yang besar menunjukkan kemampuan organisasi untuk melakukan banyak hal dalam upaya peningkatan pendapatan, penyediaan sarana bagi pemerolehan informasi, akses pendidikan dan pengetahuan bagi staf, peningkatan kualitas laporan keuangan atau peningkatan kinerja. Han (2000) menyatakan ukuran organisasi yang lebih besar membuat organisasi menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan selanjutnya berdampak pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota adalah bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah (Hilmi dan Martani 2012). Semakin banyak SKPD akan membuat koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan daerah

menjadi lebih sulit dilakukan, apalagi ditambah pemahaman yang kurang memadai terhadap teknis penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Anggota DPRD mempunyai fungsi dan peran dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan yang efektif bisa membuat PEMDA melaksanakan pemerintahan sesuai amanat rakyat dengan baik, termasuk dalam hal menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar. Semakin banyak jumlah anggota DPRD, logikanya akan semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan.

E-government merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan masyarakat agar masyarakat dapat memantau aktivitas pemerintah (Bertot, Jaeger dan Grimes 2012). Penerapan *e-government* bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi, penyampaian pelayanan masyarakat, atau proses pemerintahan yang demokratis (Deakins, Dillon, Namani dan Zhang 2010). Tujuan dari *e-government* adalah untuk memberi pelayanan ke masyarakat tanpa adanya intervensi dari pegawai pemerintahan dan mengurangi sistem antrian yang panjang, selain itu penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah akses informasi oleh masyarakat sehingga dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Situs (*website*) menjadikan pemerintah daerah mudah berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungan eksternal. Sebuah situs merupakan alat komunikasi unggul yang menggambarkan budaya dan daya tanggap pemerintah daerah kepada masyarakat (Patrick 2007). Penerapan *e-government* diyakini dapat meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan karena tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat.

Pendidikan kepala daerah adalah salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Pemahaman yang memadai mengenai akuntansi dan standar akuntansi sangat diperlukan oleh pemerintah daerah agar bisa menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai kebutuhan para pengguna. Selain pegawai yang berkompeten, pemerintah daerah yang dipimpin oleh orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kepala daerah menjadi faktor penentu karena tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya dalam mengatur pemerintahan di daerah. Pendidikan kepala daerah merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam standar akuntansi pemerintahan (Suhardjanto, Rusmin, Mandasari 2009).

b. Pengembangan Hipotesis
Ukuran organisasi PEMDA (*size*)

Ukuran organisasi yang besar memungkinkan organisasi melakukan upaya yang lebih dalam menciptakan pendapatan dan mencapai kinerja. Sumber daya yang mencukupi memudahkan organisasi untuk memilih alternatif-alternatif program kerja dengan lebih leluasa dan lebih fleksibel (Han 2000). Penelitian oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) menunjukkan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2007. Dalam konteks pengungkapan wajib dalam laporan keuangan, ukuran organisasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan (Suhardjanto dan Yulianingtyas 2011; Hilmi dan Martani 2012), tetapi ukuran organisasi menjadi prediktor yang signifikan pada

inovasi akuntansi (Patrick 2007) dan kinerja keuangan PEMDA (Sumarjo 2010; Hasthoro 2013).

Berdasar uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *Ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA*

Jumlah SKPD

SKPD menunjukkan diferensiasi fungsional suatu pemerintah daerah (Patrick 2007). Kebutuhan untuk melayani masyarakat akan membentuk seberapa banyak SKPD yang harus ada di pemerintah. Hasil penelitian oleh Patrick (2007) menunjukkan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap inovasi akuntansi, dan dalam konteks pengungkapan pada laporan keuangan secara empiris terbukti bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh pada pengungkapan wajib dalam laporan keuangan (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011; Hilmi & Martani, 2012).

Berdasar uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: *Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

Jumlah Anggota DPRD

Dalam trias politika di negara Indonesia ini, fungsi legislatif adalah menjadi mitra dan pengawas bagi lembaga tinggi negara lain di lingkungan eksekutif dan yudikatif. Pada tingkat daerah, DPRD berperan dalam mengawasi kepala daerah terhadap berbagai program yang dijalankan. Maka, semakin banyak jumlah

anggota DPRD akan membuat pengawasan terhadap pemerintah daerah semakin ketat (Winarna & Murni, 2007). Penelitian oleh Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib menurut standar akuntansi pemerintahan. Tetapi jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan PEMDA (Sumarjo, 2010).

Berdasar uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: *Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

e-government

Situs (*website*) menjadikan pemerintah daerah mudah berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungan eksternal. Sebuah situs merupakan alat komunikasi yang unggul yang menggambarkan budaya dan daya tanggap pemerintah daerah kepada masyarakat (Patrick 2007; Deakins, Dillon, Namani, dan Zhang 2010). Penelitian oleh Patrick (2007) membuktikan bahwa kualitas situs berpengaruh terhadap inovasi organisasi.

Berdasar uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *E-government berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA.*

3. Metoda Penelitian

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat II seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang masuk dalam indeks *e-government* oleh Universitas Gunadarma tahun 2010 dan laporan keuangannya tahun 2010 telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan daerah yang diaudit oleh BPK disusun berdasar PP No 24 Tahun 2005, karena PP No 71 Tahun 2010 baru diterapkan mulai tahun fiskal 2014.

b. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

1). Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang diproksi dengan opini audit BPK. Opini audit adalah pendapat dari auditor atas laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang diaudit. Opini akan diberi skor 4 (wajar tanpa pengecualian), 3 (wajar dengan pengecualian), 2 (tidak wajar) dan 1 (*disclaimer*).

2). Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

- a). Ukuran organisasi (*size*) adalah seberapa besar organisasi tersebut (Patrick 2007). Untuk mengukur *size* bisa digunakan total aktiva, jumlah karyawan, tingkat produksi, nilai penjualan dan kapitalisasi pasar (Okada 2006). Penelitian ini menggunakan total aktiva sebagai proksi untuk ukuran organisasi pemerintah daerah. Variabel diukur dengan angka total aktiva pada neraca PEMDA.
- b). Jumlah SKPD menggambarkan kompleksitas PEMDA dalam mengelola pemerintahan. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian

dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut UU No 32 tahun 2004 Pasal 120, perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Variabel ini diukur dengan jumlah SKPD yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

- c). Jumlah DPRD menunjukkan seberapa banyak anggota dewan dalam suatu pemerintahan daerah. DPRD mempunyai fungsi dan peran pengawasan terhadap PEMDA. Variabel ini diukur dengan jumlah anggota DPRD masing-masing daerah.
- d). *E-government*, yang diproksi dengan indeks kualitas *e-government*, yang merupakan hasil evaluasi oleh lembaga independen atas pelaksanaan *e-government* pada waktu tertentu. Angka indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Angka indeks yang mendekati 1 menunjukkan kualitas *e-government* semakin bagus.

3). Variabel Kontrol

- a). Pendidikan kepala daerah, yang merupakan variabel *dummy*, skor 1 untuk berpendidikan ekonomi dan 0 untuk lainnya. Variabel ini merupakan gambaran ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
- b). Status daerah, yang merupakan variabel *dummy*, skor 1 untuk pemerintah kota dan 0 untuk pemerintah kabupaten. Variabel ini menunjukkan bahwa pemerintah kota lebih memungkinkan memiliki laporan keuangan yang berkualitas karena kemudahan akses informasi.

c). Metoda Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode data sekunder yang diperoleh dari mengunduh pada situs Universitas Gunadarma, situs Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, situs masing-masing PEMDA dan situs BPK.

4). Metoda Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji *Multiple Regression* dengan alpha 5%.

Rumusannya adalah sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2010) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y = Opini Audit BPK
- β_0 = Konstanta
- β_1, \dots, β_6 = Koefisien Regresi
- X₁ = Ukuran Organisasi
- X₂ = Jumlah SKPD
- X₃ = Jumlah DPRD
- X₄ = *E-Government*
- X₅ = Pendidikan Kepala Daerah
- X₆ = Status Daerah
- ε = *error*

4. Hasil Dan Pembahasan

Jumlah pemerintah daerah tingkat II yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2010 adalah 496 PEMDA. Berdasarkan seleksi sampel yang dilakukan, terdapat 184 PEMDA yang memenuhi syarat untuk bisa dilanjutkan dalam pengujian hipotesis. Untuk hasil olah data dengan menggunakan SPSS v.16 akan disajikan dalam pembahasan dibawah ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
OPINI	2.8043	.70500	184
ASET	12.2753	.28210	184
SKPD	52.6467	32.99379	184
DPRD	38.7120	9.96105	184
EGOV	.2501	.15939	184
PDIK	.3859	.48813	184
STDA	.2717	.44607	184

Data dalam tabel diatas bisa diinterpretasi bahwa secara rerata (*mean*) kualitas laporan keuangan PEMDA, yang diproksi dengan opini audit BPK, belum baik karena nilainya 2,804 yang berarti dibawah opini wajar dengan pengecualian (nilai 3). Permasalahan mengenai adaptasi dan edukasi standar akuntansi sesuai PP No 24 Tahun 2005 bagi tata laksana akuntansi di PEMDA harus menjadi perhatian yang serius oleh pimpinan. Apalagi sudah disusul aturan baru berupa PP No 71 Tahun 2010 yang membutuhkan pemahaman lebih bagi pegawai PEMDA untuk menyusun laporan keuangan.

Regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan metode *listwise/enter*. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,060 yang berarti 6% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (*size*, jumlah SKPD, jumlah anggota DPRD, dan *e-government*) dan variabel kontrol (*pendidikan kepala daerah dan status daerah*) dan sisanya 94% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai F hitung sebesar 2,490 (*p-value 0,009*), signifikan pada level 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan PEMDA atau dengan kata lain ukuran organisasi, jumlah SKPD, jumlah anggota DPRD, *e-*

government, pendidikan kepala daerah, dan status daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA.

Tabel 2. Pengujian Hipotesis Menggunakan Analisis Regresi

Variabel	Prediksi Arah	Koefisien	t	Sig
(Constant)		1,090	-0,897	0,371
Ukuran organisasi (size)	+	0,157	1,351	0,178
Jumlah SKPD	+	-0,145	-2,020	0,045*
Jumlah anggota DPRD	+	0,175	1,424	0,156
<i>e-government</i>	+	0,398	2,334	0,021*
Pendidikan Kepala Daerah	+	-0,088	-1,663	0,098
Status Daerah	+	0,015	0,220	0,826
<i>R Square</i>		0,091		
<i>Adjusted R-Square</i>		0,060		
F		2,940		
Sig		0,009		

*signifikan pada level 5%

Tabel diatas menunjukkan varibel Jumlah SKPD (*p-value 0,045*) dan *e-government* (*p-value 0,021*) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA, tetapi untuk jumlah SKPD arah koefisiennya negatif. Variabel lainnya, yaitu ukuran organisasi (*p-value 0,178*) , jumlah anggota DPRD (*p-value 0,156*), pendidikan kepala daerah (*p-value 0,098*), dan status daerah (*p-value 0,826*) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, yang diproksi dengan *e-government*, berperan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas laporan keuangan PEMDA.

E-government menjadikan pemerintah daerah mudah berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungan eksternal. Sebuah situs (penjabaran *e-government*) merupakan alat komunikasi yang unggul yang menggambarkan budaya dan daya tanggap pemerintah daerah kepada masyarakat (Patrick, 2007; Deakins, Dillon, Namani, & Zhang, 2010). Pengawasan terhadap PEMDA oleh masyarakat menjadi lebih banyak dan transparan dengan implementasi *e-government*. Hal ini yang menyebabkan PEMDA selalu berusaha menjalankan program-programnya dengan baik, termasuk dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh struktur organisasi dan budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA. Struktur organisasi meliputi ukuran organisasi, jumlah SKPD, dan jumlah anggota DPRD. Budaya organisasi dalam penelitian ini diproksi dengan *e-government* seperti yang dilakukan oleh Patrick (2007). Untuk memperkuat pengaruh dan determinasi digunakan variabel kontrol yaitu pendidikan kepala daerah dan status daerah.

Hasil statistik menunjukkan bahwa rerata (*mean*) kualitas laporan keuangan PEMDA, yang diproksi dengan opini audit BPK, belum baik karena nilainya 2,804 yang berarti dibawah opini wajar dengan pengecualian (nilai 3). Permasalahan mengenai adaptasi dan edukasi standar akuntansi sesuai PP No 24 Tahun 2005 bagi tata laksana akuntansi di PEMDA harus menjadi perhatian yang serius oleh pimpinan. Apalagi sudah disusul aturan baru berupa PP No 71 Tahun 2010 yang membutuhkan pemahaman akuntansi lebih baik bagi pegawai PEMDA untuk menyusun laporan keuangan. Hasil regresi linier berganda menunjukkan

variabel Jumlah SKPD dan *e-government* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA, tetapi untuk jumlah SKPD arah koefisiennya negatif. Variabel lainnya, yaitu ukuran organisasi, jumlah anggota DPRD, pendidikan kepala daerah, dan status daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PEMDA.

Beberapa saran yang bisa diajukan adalah sebagai berikut: 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan PEMDA belum baik (rerata 2,804, dibawah nilai 3) yang berarti opini dari BPK masih dibawah wajar dengan pengecualian. Pemerintah pusat perlu memberikan porsi dana khusus yang lebih banyak terutama dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Salah satu upaya adalah dengan melakukan edukasi mengenai penerapan PP No 71 Tahun 2010 secara terus menerus terhadap pegawai PEMDA, dan bisa dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. 2) Isu yang berkembang sekarang ini adalah upaya PEMDA melakukan reformasi birokrasi. Poin penting dalam upaya reformasi birokrasi adalah efisiensi penggunaan dana yang sesuai tujuan. Akan lebih baik jika aset (kekayaan) yang dimiliki tidak dikorupsi dan digunakan sebaik-baiknya, jumlah SKPD yang ramping sehingga memudahkan koordinasi, dan kualitas anggota DPRD yang lebih diprioritaskan daripada kuantitasnya.

Daftar Referensi

- Abdullah, S., dan J.A. Asmara. 2007. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 10 (1), hal. 20-41.
- Adhikari, P., dan F. Mellemyk. 2011. The rise and fall of accruals: A case of Nepalese central government. *Journal of Accounting in Emerging Economies* 1 (2), hal. 123-143.
- Azhar, M.K.S. 2008. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah. Tesis tidak dipublikasi Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (edisi ketiga). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bertot, J.C., P.T. Jaeger dan J.M. Grimes. 2010. Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy* 6 (1), hal. 78-91.
- Blondal, J.R. 2003. Accrual accounting and budgeting: Key issues and recent developments. *Journal on Budgeting* 3 (1), hal. 43-59.
- Chan, Y.C.L. 2004. Performance measurement and adoption of balanced scorecards: A survey of municipal governments in the USA and Canada. *International Journal of Public Sector Management* 17 (3), hal. 204-221.
- Deakins, E., S. Dillon., H.A. Namani dan C. Zhang. 2010. Local e-government impact in China, New Zealand, Oman and the United Kingdom. *International Journal of Public Sector Management* 23 (6), hal. 520-534.
- Fenwick, J., dan K.J. Miller. 2012. Political management and local performance: A testing relationship? *International Journal of Public Sector Management* 25 (3), hal. 221-230.
- Gujarati, D.N., dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-dasar ekonometrika* (edisi kelima). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Han, C.C. 2000. Organizational size, flexibility, and performance: A system dynamics approach. *Working Paper* Departement of Public Administration, Tamkang University, Taiwan.
- Hariyadi, B. 2002. Pengaruh kebijakan fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah (Suatu kajian empiris di Propinsi Jawa Timur). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi V* di Semarang, Indonesia.

- Hasthoro, H.A. 2013. Karakteristik Pemerintah Daerah, Korupsi, dan Kinerja Keuangan Daerah. Tesis tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Hilmi, A.Z., dan D. Martani. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah propinsi. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, Indonesia.
- Marwata, dan M. Alam. 2006. The interaction amongst reform drivers in governmental accounting changes: The case of Indonesian local government. *Journal of Accounting & Organizational Change* 2 (2), hal. 144-163.
- Mimba, N.P.S.H., G.J. Helden, dan S. Tillema. 2007. Public sector performance measurement in developing countries: A literature review and research agenda. *Journal of Accounting & Organizational Change* 3 (3), hal. 192-208.
- Patrick, P.A. 2007. The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Disertasi tidak dipublikasikan The Graduate School of Public Affairs The Pennsylvania State University.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Kas Menuju Akrual).
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Bebasis Akrual).
- Suhardjanto, D., Rusmin dan P. Mandasari. 2009. Kepatuhan pengungkapan standar akuntansi pemerintahan yang wajib dan karakteristisik pemerintah daerah: Bukti pada kabupaten di Indonesia. *Hibah Publikasi Penelitian Internasional LPPM UNS*.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi tidak dipublikasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Timoshenko, K., dan P. Adhikari. 2009. Exploring Russian central government accounting in its context. *Journal of Accounting & Organizational Change* 5 (4), hal. 490-513.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2006 Tentang Badan
Pemeriksa Keuangan.

Verbeeten, F.H.M. 2008. Performance management practices in public sector
organization: Impact on performance. *Accounting, Auditing &
Accountability Journal* 21 (3), hal. 427-454.

Warner, M.E. 2012. Does local government size matter? Privatization and hybrid
systems of local service delivery. *Working Paper* International Center for
Public Policy, Georgia State University, USA.

Wilson, C., D. Hagarty., dan J. Gauthier. 2004. Result using the balanced
scorecard in the public sector. *Journal of Corporate real Estate* 6 (1), hal.
53-64.

Wyk, H.A.V. 2007. Is the transformation of public sector financial reporting in
South Africa's provincial governments on track? *Meditari Accountancy
Research* 15 (2), hal. 65-75.

Yang, C.L., dan S. Modell. 2013. Power and performance: Institutional
embeddedness and performance management in a Chinese local government
organization. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 26 (1): 101-
132.

Struktur Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On